BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Periode ini ditandai dengan stabilitas politik yang relatif terjaga, namun sering kali dicapai dengan cara-cara otoritarian. Rezim Soeharto yang memerintah selama lebih dari tiga dekade menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk kontrol terhadap media, pembatasan partai politik, dan represi terhadap kelompok-kelompok oposisi. Salah satu aspek utama dari Orde Baru adalah penggunaan Pancasila sebagai ideologi tunggal yang diwajibkan bagi seluruh elemen masyarakat. Kebijakan ini sering kali digunakan untuk membungkam suara-suara kritis yang dianggap mengancam stabilitas nasional.

Pada masa Orde Baru, peran oposisi sering kali dibungkam melalui berbagai cara, mulai dari intimidasi hingga pengekangan kebebasan berekspresi. Namun, keberanian Ali Sadikin bersama tokoh-tokoh lainnya dalam Petisi 50 menciptakan ruang diskusi yang membangun kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menginspirasi gerakan-gerakan masyarakat sipil dan kelompok oposisi lainnya untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh dinamika politik Ali Sadikin pada masa Orde Baru, dengan fokus pada transformasi peran politiknya serta dampak yang ditimbulkannya terhadap perkembangan politik nasional.

Ali Sadikin adalah salah satu tokoh politik yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia pada masa Orde Baru (1966-1998).¹ Sebagai

¹ Jalan Politik Ali Sadikin Lewat Petisi 50. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024. <https://www.tempo.co/arsip/ali-sadikin-petisi-50-833965>

Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977², ia dikenal dengan berbagai kebijakan inovatif yang mengubah wajah ibu kota. Setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur, Ali Sadikin menjadi salah satu oposisi yang vokal terhadap rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Peralihan perannya dari seorang pejabat eksekutif yang dekat dengan penguasa menjadi kritikus keras pemerintah mencerminkan dinamika politik yang kompleks pada masa itu.

Pada tahun 1980, Ali Sadikin menjadi salah satu pencetus Petisi 50, yang merupakan kritik terbuka terhadap rezim Orde Baru. Petisi ini mengekspresikan keprihatinan atas penyimpangan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan Soeharto. Tindakan berani ini menunjukkan sikap kritis Ali terhadap pemerintah yang semakin otoriter, meskipun ia harus membayar mahal dengan pengucilan dari kehidupan sosial dan politik.³

Ali Sadikin, sebagai bagian dari Petisi 50, memiliki peran strategis dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun banyak tokoh yang memilih untuk diam demi keamanan pribadi, Ali Sadikin justru mengambil risiko besar dengan menyatakan pendapatnya secara terbuka. Sikap ini mengundang reaksi keras dari pemerintah, termasuk berbagai bentuk intimidasi dan isolasi politik. Namun, keberanian Ali Sadikin dan koleganya mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Dalam konteks ini, dinamika politik individu seperti Ali Sadikin menjadi sangat menarik untuk diteliti. Ali Sadikin merupakan sosok yang memiliki signifikansi tersendiri dalam memahami Petisi 50, karena perjalanan politiknya mengandung paradoks yang jarang ditemukan pada tokoh lain. Sebagai Gubernur DKI Jakarta (1966–1977), ia identik dengan keberhasilan

² Susan Blackburn. *Sejarah Jakarta 400 tahun*. (Jakarta: Masup Jakarta, 2011). Hlm. 291

³ Perang Dingin Soeharto - Ali Sadikin. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
<https://historia.id/politik/articles/perang-dingin-soeharto-ali-sadikin-DrRdb>

pembangunan pada masa awal Orde Baru, mulai dari modernisasi infrastruktur, pengembangan pendidikan, hingga promosi seni dan kebudayaan. Rekam jejak ini menempatkannya sebagai simbol keberhasilan rezim. Namun, setelah tidak menjabat lagi, justru ia tampil sebagai oposisi yang lantang mengkritik Soeharto melalui Gerakan Petisi 50. Penelitian terhadap Ali Sadikin memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana seorang pejabat yang semula dianggap sebagai “produk rezim” dapat berbalik arah menjadi pengkritik keras. Hal ini mengungkap dimensi lain dari dinamika politik Orde Baru: bahwa resistensi bisa lahir dari individu yang justru pernah menjadi bagian dari legitimasi awal rezim.

Pemilihan rentang tahun 1980 hingga 1998 dalam penelitian ini didasarkan pada pentingnya periode tersebut dalam sejarah politik Indonesia. Tahun 1980 menandai puncak keberanian sejumlah tokoh nasional, termasuk Ali Sadikin, dalam mengkritik pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto melalui deklarasi Petisi 50. Era ini menjadi masa konsolidasi kekuasaan oleh Soeharto yang menciptakan sistem pemerintahan otoritarian dengan kontrol ketat terhadap kehidupan politik. Sementara itu, tahun 1998 menjadi akhir dari era Orde Baru dengan lengsernya Soeharto akibat tekanan reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi dan gelombang demonstrasi besar-besaran. Rentang waktu ini memberikan ruang untuk mengeksplorasi perkembangan politik yang melibatkan Ali Sadikin sebagai oposisi terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam kurun waktu tersebut, Ali Sadikin memainkan peran penting sebagai figur yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Partisipasinya dalam Petisi 50 menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme, yang relevan untuk memahami bagaimana tokoh masyarakat menavigasi dinamika politik yang penuh tekanan. Oleh karena itu, periode 1980-1998 dipilih untuk memberikan fokus temporal yang jelas dalam penelitian ini.

Judul penelitian ini, "Peran Ali Sadikin Dalam Gerakan Petisi 50: Kritik Oposisi Terhadap Kebijakan Orde Baru tahun 1980-1998" dilatarbelakangi

oleh posisi Ali Sadikin sebagai figur unik dalam sejarah politik Indonesia. Sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta (1966–1977), Ali Sadikin dikenal luas sebagai birokrat yang dekat dengan masyarakat sekaligus berani mengambil kebijakan progresif. Namun, yang membuatnya berbeda adalah keberaniannya untuk memindahkan haluan dari lingkaran kekuasaan menuju barisan oposisi melalui Gerakan Petisi 50. Keputusan tersebut bukan sekedar langkah politik biasa, namun juga mencerminkan sikap moral seorang tokoh bangsa yang menolak membiarkan Pancasila dijadikan alat politik oleh rezim Orde Baru. Kajian mendalam terhadap peran Ali Sadikin menjadi penting, karena dapat mengungkap dimensi baru bagaimana seorang pejabat tinggi negara justru menantang otoritarianisme dari dalam sistem itu sendiri.

Selain itu, judul ini menarik karena memberikan peluang untuk mengeksplorasi hubungan antara ideologi, kebijakan, dan resistensi dalam konteks politik Indonesia. Studi tentang Ali Sadikin dapat mengungkap bagaimana individu-individu tertentu mampu mempengaruhi narasi politik nasional meskipun berada dalam sistem yang represif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam memahami sejarah politik Indonesia tetapi juga dalam memberikan inspirasi tentang pentingnya keberanian dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi di bawah tekanan rezim otoriter.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, agar penelitian ini dapat terarah, maka penulis membuat batasan-batasan penelitian dengan membuat beberapa rumusan masalah. Rumusan-rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana kondisi politik pada masa orde baru, karir militer, dan karir politik ali sadikin?
2. Bagaimana peran ali sadikin pada gerakan petisi 50?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya harus mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut dalam sebuah penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi politik pada masa orde baru, karir militer, dan karir politik ali sadikin
2. Untuk mengetahui peran ali sadikin pada gerakan petisi 50?

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian sejarah umumnya tidak dimulai dari awal, melainkan dari tema dan masalah yang telah diteliti oleh sejarawan sebelumnya. Para sejarawan tersebut mewariskan pengetahuan yang nantinya akan ditelaah oleh sejarawan berikutnya melalui berbagai bacaan. Oleh karena itu, penting bagi sejarawan untuk memanfaatkan penelitian pendahulunya sebagai sumber informasi yang relevan. Untuk memperkuat penelitian ini, dilakukanlah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tersebut bertujuan untuk membedakan topik penelitian yang sedang dikaji dengan topik-topik penelitian sebelumnya. Dalam penulisan ini, penulis menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain:

1. Artikel karya Aeng Ismail Alfasi, mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, tahun 2015, dengan judul “Peran Ali Sadikin Dalam Membangun Kota Jakarta Tahun 1966-1977”. Artikel ini membahas peran Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta (1966–1977) dalam membangun kota Jakarta menjadi kota metropolitan yang modern. Dengan latar belakang militer, Ali Sadikin dikenal tegas dan inovatif, meskipun kebijakannya sering kontroversial, seperti melegalkan perjudian untuk mendanai pembangunan. Meskipun memiliki topik tokoh yang sama namun terdapat perbedaan pada artikel karya Aeng dengan penelitian penulis. Artikel karya Aeng membahas bagaimana peran Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta (1966-1977) dalam membangun kota Jakarta menjadi kota metropolitan yang modern. Sedangkan, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana peran ali sadikin pada kelompok petisi 50 dalam mengkritik pemerintahan Orde Baru. Dari penjelasan tersebut maka bisa dipastikan bahwa penelitian ini berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Rahman, mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2019, dengan judul “Hubungan Aksi-Reaksi Antara Pemerintah Orde Baru Dan Kelompok Petisi 50 (1980-1998)”. Skripsi ini mengkaji hubungan aksi-reaksi antara pemerintah Orde Baru dan Kelompok Petisi 50 sebagai kelompok kepentingan yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya pada isu demokrasi dan Pancasila. Meskipun sama-sama membahas kelompok petisi 50 dan rentang tahunnya sama, namun skripsi karya Faisal memiliki cakupan yang lebih luas mencakup seluruh kelompok Petisi 50, termasuk tokoh-tokoh selain Ali Sadikin, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada salah satu tokoh dari kelompok petisi 50 yaitu Ali Sadikin sehingga dipastikan penelitian ini berbeda.
3. Tesis karya Ade Munajat, mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia Depok, tahun 2006, dengan judul “Petisi 50 (1980-1998) suara penentang yang dibungkam”. Tesis ini membahas latar belakang, tokoh, dan dampak Petisi 50 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Orde Baru di bawah Soeharto. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana pemerintah membungkam oposisi serta peran Petisi 50 dalam dinamika politik dan perkembangan demokrasi Indonesia. Meskipun memiliki tema dan rentang tahun yang sama, namun tesis karya Ade memiliki cakupan penelitian yang lebih luas yang mencakup kelompok petisi 50 secara keseluruhan, sementara penelitian penulis hanya berfokus secara spesifik ke salah satu tokoh petisi 50 yaitu Ali Sadikin sehingga bisa dipastikan penelitian ini berbeda.
4. Skripsi karya Supeni, mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2017, dengan judul “Peran Ali Sadikin dalam Pengembangan Sektor Maritim di Indonesia 1963-1966”. Skripsi ini membahas peran Ali Sadikin dalam pengembangan sektor

maritim Indonesia (1963–1966), khususnya sebagai konseptor maritim dan pelaksana kebijakan pada saat menjabat Menteri Perhubungan Laut. Penelitian menyoroiti latar belakang strategi, membenahan pelabuhan, pengelolaan perkapalan, dan pengembangan transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas nasional. Meskipun memiliki topik tokoh yang sama namun terdapat perbedaan pada skripsi karya supeni dengan penelitian penulis. Skripsi karya supeni membahas bagaimana peran Ali Sadikin dalam pengembangan sektor maritim Indonesia selama beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana peran ali sadikin pada kelompok petisi 50 dalam mengkritik pemerintahan Orde Baru. Dari penjelasan tersebut maka bisa dipastikan bahwa penelitian ini berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Fungsi dari metode adalah untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan Metode Penelitian Sejarah. Metode ini adalah proses yang menguji dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan dari masa lalu, kemudian menyusun hasilnya berdasarkan fakta yang diperoleh. Metode Penelitian Sejarah terdiri dari beberapa tahap, yaitu penentuan topik, pengumpulan sumber yang dikenal sebagai heuristik, verifikasi yang berfungsi sebagai kritik sejarah untuk menganalisis keabsahan sumber, analisis dan sintesis yang dikenal sebagai interpretasi, serta penulisan sejarah atau historiografi.⁴

1. Heuristik

Pada tahap heuristik atau pengumpulan data, penulis mengasah keterampilan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengelola berbagai sumber. Proses ini mencakup pencarian dan pengumpulan sumber dari berbagai bentuk, seperti tulisan, artefak, lisan, visual, dan audio-visual. Tahap heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian

⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). hlm. 69.

sejarah yang melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis maupun non-tulis. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen tertulis seperti buku, arsip, surat kabar, majalah, naskah, serta artefak dan sumber lisan dari wawancara dengan pihak yang berperan atau saksi sejarah terkait.⁵

Adapun berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibedakan menjadi dua macam yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Berdasarkan pada pemilihan sumber tersebut, ada beberapa sumber yang penulis peroleh yaitu:

A. Sumber Primer

Sumber primer ini merupakan aktor utama memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber primer dapat berupa dokumen tertulis berdasarkan kurun waktu tertentu, dokumen dari Bahasa latin atau naskah, manuscript, dapat pula berupa benda seperti prasasti, artefak berupa candi, alat-alat zaman dahulu, dan lain sebagainya.⁶ Adapun sumber primer yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut:

Sumber tertulis:

- a) Buku Ali Sadikin "*Tantangan Demokrasi*" diterbitkan pada tahun 1995, Penerbit Pusaka Sinar Harapan, Jakarta.
- b) Buku Ramadhan K.H "*Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*" diterbitkan pada tahun 1995, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta.

Sumber Arsip

- a) Arsip Tekstual Sekretariat Wakil Presiden : Umar Wirahadikusumah 1983-1988 No. 615

Sumber Majalah dan Koran

- a) Majalah, *Tempo*, No. 49 Tahun 1994

⁵ *Ibid.* hlm. 69

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 2013. hlm. 74.

- b) Aj, “*Menpen Ali Mutopo: Mereka Mempunyai Asumsi Yang Keliru*”. Koran Kompas, Edisi 9 Juli 1980.
- c) AS, “*Penjelasan Ali Sadikin*”. Koran Kompas, Edisi 22 Oktober 1981.
- d) Rb / Sk, “*Mereka Juga Bersyukur DPR Siap Berdialog dengan Petisi 50*”. Koran Kompas, Edisi 29 September 1990.
- e) Ely, “*Kelompok Petisi 50 Siap Untuk Berdialog*” Koran Kompas, Edisi 15 Mei 1991
- f) Red, “*Sudomo: Tak Ada Kesepakatan Mengenai Permasalahan Cekal*” Koran Kompas, Edisi 22 Mei 1991
- g) Osd/ely/ii/rie/rlp/ag, “*Ali Sadikin Berdialog Dengan DPR *Harian “Kompas” Dinilai Takut*” Koran Kompas, Edisi 5 Juli 1991
- h) Ely/ii, “*Ali Sadikin Dkk Siapkan Persyaratan ke PTUN*” Koran Kompas, Edisi 22 Juli 1991
- i) Fan/myr, “*Ali Sadikin: Saya Tidak Tahu, Ini Isyarat Apa*” Koran Kompas, Edisi 14 Juli 1993
- j) Ush, “*Petisi 50 Akui Keberhasilan Pembangunan Fisik Orde Baru*” Koran Kompas, Edisi 16 Agustus 1993
- c) Fan, “*Tokoh Petisi 50 Ali Sadikin Diperiksa Kejaksaan Agung*” Koran Kompas, Edisi 18 Maret 1997

B. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang sudah diolah terlebih dahulu, seperti buku, artikel-artikel, skripsi dan lainnya.⁷

⁷ Herlina, Nina, *Metode Sejarah, Edis Revisi 2*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm 26.

Adapun sumber sekunder yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Susan Blackburn “*Sejarah Jakarta 400 Tahun*”, (Jakarta: Masup Jakarta, 2011).
- 2) Ramadhan K.H “*Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi*”, (Jakarta: Ufuk Press, 2012)
- 3) Jalan Politik Ali Sadikin Lewat Petisi 50. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024. <https://www.tempo.co/arsip/ali-sadikin-petisi-50-833965>
- 4) Perang Dingin Soeharto - Ali Sadikin. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024. <https://historia.id/politik/articles/perang-dingin-soeharto-ali-sadikin-DrRdb>

2. Kritik

Setelah mengumpulkan berbagai sumber, langkah berikutnya adalah menyeleksi sumber-sumber tersebut. Proses ini dikenal sebagai tahap kritik atau verifikasi. Pada tahap ini, penulis melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber yang sudah terkumpul. Verifikasi ini mencakup kritik eksternal, yaitu pemeriksaan aspek fisik sumber, seperti bahan dan kondisi sumber, untuk memastikan keasliannya. Selanjutnya, kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas isi dari sumber tersebut, termasuk evaluasi kondisi psikologis narasumber. Proses ini sangat penting dalam memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan adalah asli dan dapat dipercaya.⁸

A. Kritik Eksternal

Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui keabsahan suatu sumber. Proses verifikasi sumber ini dilakukan dengan cara

⁸ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) hlm. 102-103

pengecekan terhadap bahan kertas yang digunakan, gaya tulisannya, bahasanya, hurufnya, kemudian memastikan keaslian sumber apakah termasuk sumber asli atau salinan, serta semua bentuk luarnya demi mengetahui keabsahan suatu sumber.⁹

Tahapan sumber tertulis, penulis menggunakan kritik ekstern yaitu sebagai berikut:

Sumber Tulisan:

- 1) Ali Sadikin “*Tantangan Demokrasi*” diterbitkan pada tahun 1995, Penerbit Pusaka Sinar Harapan, Jakarta. Buku ini didapatkan dengan keadaan baik, kertas putih, tulisan masih terbaca jelas, buku ini penulis dapatkan di perpustakaan Universitas Indonesia.
- 2) Ramadhan K.H “*Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*” diterbitkan pada tahun 1995, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta. Buku ini didapatkan dengan keadaan baik, kertas putih, tulisan masih terbaca jelas, buku ini penulis dapatkan dan temukan secara online dalam bentuk E-Book dari Ipusnas.

Sumber Arsip:

- 1) Arsip Tekstual Sekretariat Wakil Presiden : Umar Wirahadikusumah 1983-1988 No. 615. Arsip ini didapatkan dalam baik, kertas putih, tulisan masih terbaca jelas, penulis mendapatkan arsip ini dari ANRI

Sumber Majalah dan Koran:

- 3) Majalah, *Tempo*, No. 49 Tahun 1994. Majalah ini keadaan baik, kertasnya mulai menguning, tulisan masih terbaca dengan jelas, majalah ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional.
- 4) *Menpen Ali Mutopo: Mereka Mempunyai Asumsi Yang Keliru*. Kompas Edisi 9 Juli 1980. Koran ini kondisinya masih baik,

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 2013, hlm. 77.

- kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.
- 5) *Penjelasan Ali Sadikin*. Kompas Edisi 22 Oktober 1981. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.
 - 6) *Mereka Juga Bersyukur DPR Siap Berdialog dengan Petisi 50*. Kompas Edisi 29 September 1990. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.
 - 7) *Kelompok Petisi 50 Siap Untuk Berdialog*. Kompas Edisi 15 Mei 1991. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.
 - 8) *Sudomo: Tak Ada Kesepakatan Mengenai Permasalahan Cekal*. Kompas Edisi 22 Mei 1991. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.
 - 9) *Ali Sadikin Berdialog Dengan DPR, Harian "Kompas" Dinilai Takut*. Kompas Edisi 5 Juli 1991. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.
 - 10) *Ali Sadikin Dkk Siapkan Persyaratan ke PTUN*. Kompas Edisi 22 Juli 1991. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.
 - 11) *Ali Sadikin: Saya Tidak Tahu, Ini Isyarat Apa*. Kompas Edisi 14 Juli 1993. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah

mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.

12) *Petisi 50 Akui Keberhasilan Pembangunan Fisik Orde Baru*.

Kompas Edisi 16 Agustus 1993. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.

13) *Tokoh Petisi 50 Ali Sadikin Diperiksa Kejaksaan*. Kompas Edisi

18 Maret 1997. Koran ini kondisinya masih baik, kertasnya sudah mulai menguning, tulisan masih bisa dibaca jelas, koran ini saya dapatkan di perpustakaan Nasional Salemba.

B. Kritik Internal

Kritik intern yaitu untuk membuktikan kebenaran atau kredibilitas dari sumber yang di dapat itu bisa di percaya atau tidak. Pada kritik intern ini lebih menekankan pada aspek isi dari pada sumber yang di dapat sesuai dengan apa yang sedang di teliti atau tidak. Maka dari itu kesaksian yang telah di dapat harus benar-benar bisa di pahami dengan menetapkan arti yang sebenarnya yang telah pelaku dan saksi sejarah uraikan.¹⁰

Pada tahapan sumber primer ini, peneliti melakukan kritik intern yaitu sebagai berikut:

1) *Tantangan Demokrasi (1995)*. Buku ini mencerminkan perjalanan politik Ali Sadikin, dari seorang pejabat pemerintah menjadi oposisi yang lantang mencerminkan reformasi dan keadilan. Inti dari buku *Tantangan Demokrasi* karya Ali Sadikin adalah kritik terhadap lemahnya penerapan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Ali Sadikin menggarisbawahi kekuasaan, maraknya

¹⁰ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, 2014, hlm 104.

korupsi, menegakkan kebebasan berpendapat, dan otoritarianisme rezim Soeharto. Ia menekankan pentingnya demokrasi yang sehat, jujur, dan adil, serta mendorong generasi muda untuk terlibat dalam politik yang berlandaskan moralitas dan integritas.

- 2) Pers Bertanya Bang Ali Menjawab (1995). Buku karya Ramadhan KH berisi wawancara dan diskusi antara Ali Sadikin dengan berbagai wartawan mengenai berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi selama masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta (1966–1977) dan setelahnya. Buku ini mencerminkan keterbukaan Ali Sadikin dalam menghadapi kritik dan pertanyaan tajam dari pers, serta bagaimana ia menjelaskan kebijakan-kebijakannya dengan lugas dan berani.
- 3) Arsip Tekstual Sekretariat Wakil Presiden : Umar Wirahadikusumah 1983-1988 No. 615. Arsip ini berisikan surat kelompok Petisi 50 pernyataan keprihatinan kepada MPR RI tentang saran terhadap Pemilu.
- 4) Tempo, No. 49 Tahun 1994. Majalah ini berisikan wawancara majalah tempo dengan Ali Sadikin mengenai keterlibatannya pada gerakan petisi 50 dan kekecewaannya terhadap pelaksanaan pemerintahan orde baru, selain itu juga dibahas di dalamnya perjalanan panjangnya di bidang militer, politik, dan pemerintahan.
- 5) Menpen Ali Murtopo: Mereka Mempunyai Asumsi Yang Keliru. Kompas Edisi 9 Juli 1980. Koran ini membahas pernyataan Menteri Penerangan Ali Murtopo menjelaskan bahwa para penandatangan "Petisi 50 Orang" yang disampaikan ke DPR tempo hari. mempunyai asumsi yang keliru terhadap pembangunan. Akibatnya mereka menciptakan satu "assignment" yang keliru. sehingga akhirnya membuat ke-simpulan yang keliru pula.

- 6) Penjelasan Ali Sadikin. Kompas Edisi 22 Oktober 1981. Koran ini membahas penolakan Ali Sadikin dan para penandatangan Petisi 50 untuk dicalonkan dalam Pemilu 1982. Mereka menilai undang-undang pemilu dan regulasi politik saat itu tidak sesuai dengan UUD 1945, sebagai bentuk kritik terhadap sistem politik Orde Baru. Pernyataan ini merespon pernyataan anggota DPR Fraksi Karya Pembangunan Ir. Sarwono Kusumaatmaja
- 7) Mereka Juga Bersyukur DPR Siap Berdialog dengan Petisi 50. Kompas Edisi 29 September 1990. Koran ini membahas ungkapan rasa syukur Ali Sadikin terhadap DPR yang mau berdialog dengan kelompok gerakan Petisi 50
- 8) Kelompok Petisi 50 Siap Untuk Berdialog. Kompas Edisi 15 Mei 1991. Koran ini memuat pernyataan dari Ali Sadikin yang mengatakan bahwa kelompok petisi 50 siap melakukan dialog dengan pemerintah. Pernyataan ini sebagai respon dari pernyataan Menko Polkam Sudomo tentang kelompok petisi 50 di berbagai media.
- 9) Sudomo: Tak Ada Kesepakatan Mengenai Permasalahan Cekal. Kompas Edisi 22 Mei 1991. Koran ini memuat konferensi pers Menko Polkam Sudomo dengan Ali Sadikin dan anggota petisi 50 yang baru saja melakukan pertemuan yang membahas pencahangan anggota petisi 50 untuk berpergian keluar negeri.
- 10) Ali Sadikin Berdialog Dengan DPR, Harian “Kompas” Dinilai Takut. Kompas Edisi 5 Juli 1991. Koran ini memuat wawancara Ali Sadikin setelah melakukan pertemuan dengan Komisi II dan Komisi III DPR-RI. Selain itu, Ali Sadikin juga menyindir media Kompas. Ali mengkritik media, terutama Kompas, karena takut memberitakan secara terbuka dan lebih memilih menyembunyikan berita penting. Ia menilai media tidak berani menyajikan informasi secara jujur dan terbuka kepada publik.

- 11) Ali Sadikin Dkk Siapkan Persyaratan ke PTUN. Kompas Edisi 22 Juli 1991. Koran ini memuat tentang langkah hukum yang diambil oleh Ali Sadikin dan kelompok Petisi 50 untuk menolak pelarangan bepergian ke luar negeri yang diberlakukan oleh pemerintah. Mereka menganggap kebijakan tersebut tidak adil dan melanggar hak mereka, sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- 12) Ali Sadikin: Saya Tidak Tahu, Ini Isyarat Apa. Kompas Edisi 14 Juli 1993. Koran ini memuat komentar Ali Sadikin tentang kunjungan Menko Polkam Soesilo Soedarman, Menhamkan Edi Sudradjat, Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung dan Wakil KSAD Letjen Soerjadi ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjenguk AH Nasution.
- 13) *Petisi 50 Akui Keberhasilan Pembangunan Fisik Orde Baru.* Kompas Edisi 16 Agustus 1993. Koran ini memuat pernyataan Ali Sadikin dan Petisi 50 yang mengkritik fokus Orde Baru pada pembangunan fisik dan ekonomi, sementara pembangunan manusia diabaikan. Ali Sadikin mengusulkan dialog antara Presiden Soeharto dan Jenderal (Purn) Abdul Haris Nasution untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Petisi 50 menekankan pentingnya solidaritas, disiplin, dan tanggung jawab nasional dalam mengatasi tantangan bangsa.
- 14) Tokoh Petisi 50 Ali Sadikin Diperiksa Kejaksaan. Kompas Edisi 18 Maret 1997. Koran ini memuat wawancara Ali Sadikin yang baru saja diperiksa Kejaksaan Agung selama 1 jam terkait Ali Sadikin yang diduga meminta buku karya Soebadio berjudul *Era Baru Pemimpin Baru: Badio Menolak Rezim Orde Baru* yang dilarang beredar Kejaksaan Agung.

3. Interpretasi

Langkah berikutnya adalah tahap interpretasi, di mana pada tahap ini akan dilakukan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Sumber-sumber sejarah hanya mencatat fakta-fakta yang menarik untuk ditulis. Oleh karena itu, sumber-sumber sejarah hanya memuat fakta yang telah sejalan dengan teori yang ada. Teori-teori yang tidak dapat dibuktikan bisa dianggap bersifat sirkular, yaitu teori tersebut bisa disebut sebagai interpretasi umum. Kemampuan interpretasi sangat penting, karena kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menguraikan fakta-fakta sejarah, memahami relevansi topik sejarah, serta menjelaskan masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Tidak ada interpretasi yang bersifat final, karena interpretasi lain mengenai sejarah sangat mungkin muncul.¹¹

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dramaturgi, Teori dramaturgi Erving Goffman memandang interaksi sosial seperti pertunjukan teater, di mana individu mengelola kesan melalui "panggung depan" dan "panggung belakang". Teori ini relevan untuk memahami fenomena sosial modern, termasuk di Indonesia, seperti politik, media sosial, dan interaksi kerja¹².

Melalui teori ini, peneliti dapat menggali bagaimana Ali Sadikin mengelola kesan dan menyampaikan pesan politiknya kepada publik dan pemerintah, dalam situasi yang penuh risiko. Pemilihan kata, ekspresi, media yang digunakan, serta konteks sosial yang melatarbelakangi aksinya menjadi bagian dari narasi performatif yang bisa dianalisis menggunakan teori dramaturgi. Teori ini juga memungkinkan untuk memahami bagaimana konflik ideologis antara oposisi dan rezim penguasa dipertontonkan di ruang publik, serta

¹¹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 2014, h. 107-108

¹² Lovendo, T., Sari, N., & Ningsih, I. R. *Teori sosiologi kontemporer*. (Gowa: CV Ruang Tentor, 2025) hlm. 47

bagaimana publik merespons peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh seperti Ali Sadikin.

Teori dramaturgi yang diperkenalkan oleh Erving Goffman relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana Ali Sadikin membangun dan menampilkan peran sosial-politiknya sebagai tokoh oposisi melalui Gerakan Petisi 50. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru yang represif dan sentralistik, setiap tindakan perlawanan politik tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga simbolik. Dengan menggunakan perspektif dramaturgi, tindakan Ali Sadikin dapat dilihat sebagai bentuk “pertunjukan politik” di panggung depan, di mana ia dengan sadar mengonstruksi citra sebagai pembela demokrasi dan penegak konstitusi. Sementara itu, dinamika perencanaan, konsolidasi antar tokoh Petisi 50, serta strategi penyampaian kritik terhadap Soeharto merupakan aktivitas di “panggung belakang” yang penting untuk dianalisis.

Lalu Penulis juga menggunakan ilmu bantu yaitu ilmu politik, Ilmu politik relevan sebagai ilmu bantu dalam penelitian “Peran Ali Sadikin Dalam Gerakan Petisi 50: Kritik Oposisi Terhadap Kebijakan Orde Baru Tahun 1980-1998” karena membantu memahami konteks kekuasaan, kebijakan, dan dinamika hubungan antara Ali Sadikin sebagai tokoh oposisi dengan rezim Orde Baru. Analisis pendekatan ilmu politik memungkinkan terhadap strategi oposisi yang dilakukan Ali Sadikin, pola interaksinya dengan lembaga negara, serta respon pemerintah terhadap kritiknya.

Kajian Oposisi politik adalah konsep dalam ilmu politik yang merujuk pada kelompok atau individu yang menentang kebijakan pemerintah dan menawarkan alternatif terhadap arah kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dalam penelitian **"Peran Ali Sadikin dalam Gerakan Petisi 50: Kritik Oposisi terhadap Kebijakan Orde Baru Tahun 1980-1998"**, konsep ini sangat relevan karena menjelaskan

bagaimana Ali Sadikin dan tokoh-tokoh Petisi 50 menjalankan peran oposisi dalam sistem politik otoriter Orde Baru.

4. Historiografi

Tahapan atau Langkah akhir dalam penelitian sejarah adalah proses penulisan, yang sering disebut sebagai historiografi. Historiografi adalah proses penyusunan sumber-sumber sejarah menjadi fakta sejarah yang telah disaring secara menyeluruh melalui tahap verifikasi atau kritik sejarah.¹³ Fakta-fakta yang telah ditemukan oleh penulis kemudian dituliskan dengan apa yang berkaitan dengan Peran Ali Sadikin Dalam Gerakan Petisi 50: Kritik Oposisi Terhadap Kebijakan Orde Baru Tahun 1980-1998

Historiografi dalam proposal skripsi ini terdiri dari empat BAB yaitu;

BAB I: Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian Sejarah yang dimulai dari tahapan Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

BAB II: Pada bab ini menguraikan bagaimana karir militer, karir politik dari Ali Sadikin dan dibahas juga mengenai kondisi politik pada zaman orde baru

BAB III: Pada bab ini menguraikan bagaimana gerakan petisi 50, peran ali sadikin pada gerakan petisi 50, dan dampaknya terhadap ali sadikin.

BAB IV: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah dan saran terhadap kekurangan penelitian.

Daftar pustaka, berupa pencantuman referensi atau sumber yang digunakan dalam proses penelitian.

Lampiran-lampiran, dilampirkan foto atau dokumentasi saat melakukan penelitian.

¹³ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 2014. Hlm. 147-150.